



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.852, 2022

KEMENDES-PDPT. Pemberian Tunjangan Kinerja.
Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:

- a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
 - b. pegawai dari kementerian/lembaga lain yang ditugaskan di lingkungan Kementerian;
 - c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
 - e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
 - f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
 - g. calon PNS.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
 - a. baik, dengan nilai 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
 - b. cukup, dengan nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan);
 - c. kurang, dengan nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan); dan
 - d. buruk, dengan nilai 50 (lima puluh) ke bawah.
 - (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada:

- a. Menteri;
 - b. wakil Menteri;
 - c. staf khusus;
 - d. pejabat pimpinan tinggi;
 - e. pejabat administrasi; dan
 - f. pejabat fungsional.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- Pengurangan berdasarkan komponen capaian kinerja sebagai berikut:
- a. nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. nilai di bawah 50 (lima puluh) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23A
- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- Pemberhentian tunjangan kinerja bagi pegawai dilakukan apabila:
- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. diberhentikan sebagai PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
 - e. ditugaskan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan Kementerian; dan
 - f. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pemberhentian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang diberhentikan sebagai PNS karena meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

8. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK
 MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN STAF KHUSUS

| No | Nama Jabatan | Besar Tunjangan |
|----|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Rp 43.627.500,00 |
| 2. | Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Rp 39.264.750,00 |
| 3. | Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Rp 20.695.000,00 |

B. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK
 PEJABAT PIMPINAN TINGGI

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|----|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 2. | Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 3. | Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 4. | Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 5. | Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 6. | Inspektur Jenderal | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 7. | Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | Rp 29.085.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | Rp 29.085.000,00 |
| 9. | Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | Rp 20.695.000,00 |
| 10. | Staf Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | Rp 20.695.000,00 |
| 11. | Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | Rp 20.695.000,00 |
| 12. | Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | Rp 20.695.000,00 |
| 13. | Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | Rp 20.695.000,00 |
| 14. | Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 15. | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 16. | Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 17. | Kepala Biro Hubungan Masyarakat | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 18. | Kepala Biro Hukum | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 19. | Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 20. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 21. | Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 22. | Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 23. | Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 24. | Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 25. | Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa | 15 | Rp 14.721.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 27. | Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 28. | Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 29. | Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 30. | Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 31. | Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 32. | Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 33. | Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 34. | Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 35. | Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 36. | Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 37. | Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 38. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 39. | Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 40. | Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 41. | Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 42. | Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 43. | Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 44. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 45. | Inspektur I | 15 | Rp 14.721.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46. | Inspektur II | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 47. | Inspektur III | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 48. | Inspektur IV | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 49. | Inspektur V | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 50. | Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 51. | Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 52. | Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 53. | Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 54. | Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 55. | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 56. | Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 57. | Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 58. | Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 59. | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional | 15 | Rp 14.721.000,00 |
| 60. | Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 61. | Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 62. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 63. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 13 | Rp 8.562.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Denpasar | | |
| 64. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 65. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 66. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 67. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 68. | Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura | 13 | Rp 8.562.000,00 |

C. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT ADMINISTRASI

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 2. | Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 3. | Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 4. | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 5. | Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 6. | Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 7. | Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 8. | Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal | 12 | Rp 7.271.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | | |
| 9. | Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 10. | Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 11. | Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 12. | Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 13. | Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 14. | Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 15. | Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 16. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 17. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 18. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 19. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 20. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 21. | Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 22. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 23. | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 24. | Kepala Subbagian Tata Usaha, | 9 | Rp 3.781.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|---|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan | | |
| 25. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 26. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 27. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 28. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 29. | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 30. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 31. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 32. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 33. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 34. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 35. | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 36. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 9 | Rp 3.781.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 38. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 39. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 40. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 41. | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 42. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 43. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 44. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 45. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 46. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 47. | Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 48. | Kepala Subbagian Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 49. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 50. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 51. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 52. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 53. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V | 9 | Rp 3.781.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|---|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 54. | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 55. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 56. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 57. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 58. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 59. | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 60. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 61. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 62. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 63. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 64. | Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 65. | Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta | 9 | Rp 3.781.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|---|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 66. | Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 67. | Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 68. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 69. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 70. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 71. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 72. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 73. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 74. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| 75. | Analisis Advokasi Hukum | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 76. | Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 77. | Analisis Barang Milik Negara | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 78. | Analisis Bencana | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 79. | Analisis Data dan Informasi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 80. | Analisis Hukum Pertanahan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 81. | Analisis Hubungan Masyarakat | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 82. | Analisis Investasi dan Permodalan Usaha | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 83. | Analisis Kawasan Transmigrasi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 84. | Analisis Kelembagaan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 85. | Analisis Kelembagaan Usaha | 7 | Rp 2.928.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|---|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 86. | Analisis Kemitraan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 87. | Analisis Keuangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 88. | Analisis Kerja Sama Lintas Sektor | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 89. | Analisis Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 90. | Analisis Kerja Sama Bilateral dan Regional | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 91. | Analisis Kerja Sama Luar Negeri | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 92. | Analisis Kesenian dan Budaya Daerah | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 93. | Analisis Kesehatan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 94. | Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 95. | Analisis Kinerja | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 96. | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 97. | Analisis Laporan Keuangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 98. | Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 99. | Analisis Laporan Realisasi Anggaran | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 100. | Analisis Layanan Umum | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 101. | Analisis Lingkungan Hidup | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 102. | Analisis Mitigasi Bencana | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 103. | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 104. | Analisis Mutu Produk | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 105. | Analisis Organisasi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 106. | Analisis Pangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 107. | Analisis Pelaksanaan Anggaran | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 108. | Analisis Pelayanan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 109. | Analisis Pelayanan Sosial | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 110. | Analisis Pemanfaatan Teknologi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 111. | Analisis Pemasaran dan Kerja Sama | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 112. | Analisis Pembangunan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 113. | Analisis Pemberdayaan Masyarakat | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 114. | Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 115. | Analisis Pemerintahan Pusat | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 116. | Analisis Pendidikan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 117. | Analisis Penelitian dan Pengembangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 118. | Analisis Pengawasan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 119. | Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 120. | Analisis Pengembangan Kompetensi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 121. | Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 122. | Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 123. | Analisis Pengembangan Potensi Daerah | 7 | Rp 2.928.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|--|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 124. | Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 125. | Analisis Perbendaharaan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 126. | Analisis Perekonomian | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 127. | Analisis Perencanaan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 128. | Analisis Perencanaan Anggaran | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 129. | Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 130. | Analisis Perencanaan Strategis | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 131. | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 132. | Analisis Pertanahan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 133. | Analisis Produk Hukum | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 134. | Analisis Program Pendidikan dan Pelatihan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 135. | Analisis Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 136. | Analisis Rencana Program dan Kegiatan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 137. | Analisis Sistem Informasi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 138. | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 139. | Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 140. | Analisis Sosial Budaya | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 141. | Analisis Survey, Pengukuran dan Pemetaan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 142. | Analisis Tata Laksana | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 143. | Analisis Tata Usaha | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 144. | Fasilitator Kelembagaan Pemasaran | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 145. | Fasilitator Promosi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 146. | Fasilitator Sarana Pemasaran | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 147. | Penata Kendaraan Dinas | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 148. | Penata Laporan Keuangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 149. | Penelaah Data Sumber Daya Alam | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 150. | Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 151. | Penelaah Pengembangan Usaha | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 152. | Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 153. | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 154. | Penyusun Bahan Kerja Sama Pelatihan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 155. | Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 156. | Penyusun Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 157. | Penyusun Laporan Keuangan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 158. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| 159. | Penyusun Program Penyelenggaraan | 7 | Rp 2.928.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besaran Tunjangan | |
|------|--|---------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| 160. | Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 161. | Penyusun Promosi dan Kerja Sama | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 162. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | 7 | Rp | 2.928.000,00 |

| | | | | |
|------|--|---|----|--------------|
| 163. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 164. | Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 165. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 166. | Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 167. | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 168. | Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 169. | Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 170. | Penyusun Rencana Promosi | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 171. | Penyusun Risalah | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 172. | Perancang Promosi | 7 | Rp | 2.928.000,00 |
| 173. | Ajudan | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 174. | Pengelola Anggaran | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 175. | Pengelola Bahan Perencanaan | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 176. | Pengelola Barang Milik Negara | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 177. | Pengelola Barang Persediaan | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 178. | Pengelola Data | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 179. | Pengelola Distribusi dan Pemasaran | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 180. | Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 181. | Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 182. | Pengelola Informasi Kerja Sama | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 183. | Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 184. | Pengelola Kepegawaian | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 185. | Pengelola Kerja Sama dan Investasi | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 186. | Pengelola Keuangan | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 187. | Pengelola Monitoring dan Evaluasi | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 188. | Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 189. | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 190. | Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana | 6 | Rp | 2.702.000,00 |
| 191. | Pengelola Pengembangan Karir | 6 | Rp | 2.702.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|---|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 192. | Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 193. | Pengelola Program dan Kegiatan | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 194. | Pengelola Rumah Tangga | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 195. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 196. | Pengelola Surat | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 197. | Pengolah Data | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 198. | Pengolah Data Kelembagaan | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 199. | Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 200. | Petugas Protokol | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 201. | Pranata Barang dan Jasa | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 202. | Pranata Kearsipan | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 203. | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| 204. | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 205. | Pengadministrasi Keuangan | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 206. | Pengadministrasi Pelatihan | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 207. | Pengadministrasi Pemerintahan | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 208. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 209. | Pengadministrasi Persuratan | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 210. | Pengadministrasi Pertanahan | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 211. | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 212. | Pengadministrasi Umum | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 213. | Pengemudi VIP | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 214. | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| 215. | Petugas Keamanan | 3 | Rp 2.216.000,00 |

D. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL

| No | Nama Jabatan | Jenjang | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Analisis Kebijakan | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 2. | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| 3. | Analisis Kepegawaian /Analisis Sumber | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Jenjang | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|----|---|-----------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Daya Manusia Aparatur | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 4. | Arsiparis | Pelaksana/ Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| | | Ahli Utama | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 5. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 6. | Auditor | Pelaksana/ Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 7. | Auditor Kepegawaian | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| 8. | Pranata Komputer | Pelaksana/ Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| | | Ahli Utama | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 9. | Dokter Gigi | Ahli Pertama | 9 | Rp 3.781.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Jenjang | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|----|--------------|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|----|------------------|
| 10. | Dokter | Ahli Pertama | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 11. | Peneliti | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 12. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| 13. | Penggerak Swadaya Masyarakat | Pelaksana/Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 14. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| | | Ahli Utama | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 15. | Analisis Hukum | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Jenjang | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Perawat | Pelaksana Pemula | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| | | Pelaksana | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| 17. | Perencana | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |
| 18. | Pranata Hubungan Masyarakat | Pelaksana | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| 19. | Statistisi | Pelaksana/Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| 20. | Widyaiswara | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 9 | Rp 3.781.000,00 |
| | | Ahli Madya | 11 | Rp 5.183.000,00 |
| | | Ahli Utama | 13 | Rp 8.562.000,00 |
| 21. | Analisis Anggaran | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |
| | | Ahli Utama | 14 | Rp 11.670.000,00 |

| No | Nama Jabatan | Jenjang | Kelas Jabatan | Besar Tunjangan |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Ahli Pertama | 8 | Rp 3.319.000,00 |
| | | Ahli Muda | 10 | Rp 4.551.000,00 |
| | | Ahli Madya | 12 | Rp 7.271.000,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| 23. | Teknisi Penelitian dan Perencanaan | Pemula | 5 | Rp 2.493.000,00 |
| | | Terampil | 6 | Rp 2.702.000,00 |
| | | Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | Rp 2.928.000,00 |
| | | Penyelia | 8 | Rp 3.319.000,00 |

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR